

B A B I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 2013-2018 adalah salah satu landasan operasional Kinerja yang memuat capaian target dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun yang setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan dimaksud pada dasarnya untuk mewujudkan Visi DPMPTSP Kota Bekasi yaitu “ **KOTA BEKASI SEBAGAI DAYA TARIK PENANAMAN MODAL DENGAN PELAYANAN PERIZINAN YANG CEPAT, MUDAH DAN TRANSPARAN** ”.

Untuk mencapai Visi DPMPTSP, telah dirumuskan dalam 4 Misi ialah :

1. Mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif;
2. Meningkatkan fasilitasi dan promosi penanaman modal;
3. Peningkatan efektifitas dan optimalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan *E-Government* dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan memiliki Integritas yang Tinggi.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2017 disusun untuk dijadikan pedoman atau rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 yang memuat Prioritas program dan kegiatan Pembangunan Daerah beserta indikator pencapaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

Selanjutnya Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2017 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

Di dalam penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2017 mengacu Kepada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dan Review RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

1.2 Landasan Hukum

Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi;

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi No.18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 18 Seri A);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 Seri E);
20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri E);
21. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (BPPT) Kota Bekasi;
22. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bekasi tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
23. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.17-BPPT/II/2009 tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
25. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
26. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 915/Kep.452-EkBangTP/XI/2015 tentang Standar Biaya Belanja (SBB) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2016;
27. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 911/Kep.476-BPKAD/IX/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016;
28. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.240-BPPT/V/2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;

29. Keputusan Walikota Nomor : 060/Kep.513-BPPT/XI/2016 tentang Standar Operating Procedure Perubahan Keempat terhadap Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2016 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
30. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050.3/60-1/ BPPT./2015 tentang Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 2013-2018;
31. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 050/Kep.05.1-BPPT.1 tentang Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 2013-2018 tanggal 12 Pebruari 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2017. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2017 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2017;
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2017;
3. Indikator kinerja DPMPTSP Tahun 2017;
4. Kelompok sasaran DPMPTSP Tahun 2017;
5. Pagu indikatif program dan kegiatan DPMPTSP Tahun Anggaran 2017.

Sedangkan Tujuan dari Rencana Kerja DPMPTSP adalah :

1. Sebagai landasan operasional penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2017 dalam mewujudkan Visi dan Misi DPMPTSP;
2. Menyusun rencana strategi pencapaian indikator kinerja pembangunan DPMPTSP Kota Bekasi selama tahun 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Daerah;
3. Mengevaluasi Renja BPPT dan bagian KSI Tahun Sebelumnya;
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPT dan bagian KSI Tahun sebelumnya;

5. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Tahun 2017;
6. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT DAN BAG. KSI TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT DAN BAG. KSI Setda Kota Bekasi Tahun 2016 dan Capaian Renstra BPPT DAN BAG. KSI
 - 2.1.1 Program kegiatan di lingkungan BPPT DAN BAG. KSI Setda Kota Bekasi
 - 2.1.1.1 Program Kegiatan di lingkungan BPPT Kota Bekasi;
 - 2.1.1.2 Program Kegiatan di lingkungan Bagian KSI Setda Kota Bekasi;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPT DAN BAG.KSI
- 2.3 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada BPPT DAN Bagian KSI Tahun Anggaran 2016
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
 - 2.4.1 Identifikasi Masalah Utama
 - 2.4.2 Identifikasi Permasalahan Tugas dan fungsi
 - 2.4.2.1 Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
 - 2.4.2.2 Pelayanan Perizinan Pembangunan

2.4.2.3 Pengembangan Data Teknologi Informasi dan
Pengaduan

2.4.2.4 Pengendalian Pelaksanaan Modal

2.4.2.5 Penanaman Modal

BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan
DPMPTSP Kota Bekasi 2013-2018

3.1.1 Visi

3.1.2 Misi

3.1.3 Tujuan

3.1.4 Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kota Bekasi 2013-2018

3.2.1 Strategi

3.2.2 Arah kebijakan Umum DPMPTSP Kota Bekasi

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPSTP Kota Bekasi

3.4 Program dan Kegiatan

3.4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

3.4.2 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

3.4.3 Prioritas Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

3.4.4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

3.4.5 Sasaran dan Indikator Sasaran

3.4.6 Sasaran

3.4.7 Indikator Sasaran

BAB V Penutup

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT DAN BAG. KSI SETDA KOTA BEKASI TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT DAN BAG. KSI Tahun 2016 dan Capaian Renstra BPPT DAN BAG. KSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor..... tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hal tersebut maka akan di evaluasi kegiatan SKPD sebelum dibentuknya DPMPTSP, evaluasi kegiatan yang akan dilakukan adalah Evaluasi Kegiatan yang menjadi kewenangan pada SKPD Terdahulu (BPPT) Kota Bekasi yaitu pada bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Evaluasi Kegiatan Penanaman Modal dan investasi pada bagian (KSI) Setda Kota Bekasi. Pelaksanaan Kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2016 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013 -2018, Rencana Strategis BPPT Kota Bekasi Tahun 2013-2018, RKPD Kota Bekasi Tahun 2016 serta tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 tahun 2008 Tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Walikota dalam Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik, dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pengembangan Investasi serta Peningkatan Penanaman Modal.

2.1.1 Program kegiatan di lingkungan BPPT DAN BAG. KSI Setda Kota Bekasi

2.1.1.1 Program Kegiatan di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016

Program Peningkatan Perizinan

- Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
- Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008;
- Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT;
- Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008;
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
- Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut diatas dapat disampaikan dalam tabel 2.1.1.1 uraian penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1.1.1
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82, 05		Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rp. 1.914.600.000
			1	Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	Rp. 180.000.000
			2	Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008	Rp. 270.000.000
			3	Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT	Rp. 112.500.000
			4	Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008	Rp. 238.500.000
			5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp. 381.600.000
			6	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	Rp. 682.000.000
			7	Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	Rp. 50.000.000
Jumlah					Rp. 1.914.600.000

Dengan Telah Berakhirnya Tahun anggaran 2016 bersama ini disampaikan Realisasi Program/Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Sebagai Evaluasi Kinerja dalam pencapaian Target/sasaran. Adapun Program dan kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016, Sebagai Berikut :

A. *Pagu Anggaran Belanja Langsung Penunjang usan Sebesar Rp.7.659.746.099,- yang terdiri dari 5 program 24 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :*

✓ *Kegiatan Belanja langsung Penunjang Urusan Sebanyak 24 kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp.5.745.146.099,- terdiri dari 5 Program yaitu :*

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Pagu anggaran sebesar Rp.4.560.626.599,-*
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.627.019.500,-*
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Pagu anggaran sebesar Rp.416.500.000,-*
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Pagu anggaran Rp.30.000.000,-*
- 5. Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp.111.000.000,-*

✓ *Belanja Langsung Urusan Terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.914.600.000,-*

- 1. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dengan Pagu anggaran sebesar Rp.1.914.600.000,-*

Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan tersebut kami telah berusaha memotifasi para pengelola kegiatan agar tugas fungsional atau tambahan dilakukan secara maksimal, namun realisasi pencapaian terhadap kinerja/output dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebesar 98,24% dan realisasi keuangan 88,17% dengan Rincian sebagai berikut :

B. *Realisasi Belanja Langsung Penunjang Urusan Sebanyak 24 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.753.828.840,- dengan rincian sebagai berikut :*

✓ *Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan Sebanyak 24 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.655.583.930,- terdiri dari 5 program yaitu:*

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.990.105.446,- (87,49%)*
 2. *Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.545.787.243,- (87,04%)*
 3. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.405.936.000,- (97,46%)*
 4. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran Rp.24.130.000,- (80,43%)*
 5. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.104.734.000,- (94,35%)*
- ✓ *Belanja Langsung Urusan terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.683.136.151,- (87,91%).*

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rencana kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 merencanakan 1 Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan Belanja Langsung Urusan dan 5 (lima) Program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan dengan total alokasi Anggaran murni dan anggaran ABT pada Belanja Langsung Urusan Tahun 2016 adalah 7.659.746.099 (Tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan Belanja Tidak langsung Tahun 2016 adalah 7.607.259.000 (Tujuh milyar enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) serta total keseluruhan Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 15.267.005.099 (lima belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dapat disampaikan dalam tabel 2. 1.1.1.2 uraian Belanja Langsung Urusan BPPT Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel
2.1.1.1.2
LAPORAN PENYERAPAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI

Tanggal : 30 Desember 2016

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN ABT	TOTAL	REALISASI			SISA ANGGARAN	SISA ANGGARAN
					NOMINAL	KEU %	FISIK %		
1	2	3	3	3	4	5	6		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,448,080,500	1,112,546,099	4,560,626,599	3,990,105,446	87.49	97.05	570,521,153	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	-	5,000,000	3,574,830	71.50	100.00	1,425,170	- Paket Pengiriman Rp.1.425.170
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305,880,500	100,000,000	405,880,500	276,273,233	68.07	90.00	129,607,267	- Telepon, Listrik dan Internet Rp. 129.607.267
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	90,000,000	-	90,000,000	67,442,825	74.94	90.00	22,557,175	- Jasa Kebersihan Kantor Termyn IV tidak dapat dibayarkan karena BPPT pindah kantor akibat kebakaran Rp. 22.557.175
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	275,000,000	87,624,734	362,624,734	336,427,180	92.78	100.00	26,197,554	- Efisiensi Belanja ATK Rp. 26.197.554
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	400,000,000	91,021,365	491,021,365	411,260,250	83.76	100.00	79,761,115	- Efisiensi Belanja Cetak Rp.79.761.115
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	-	10,000,000	9,052,000	90.52	100.00	948,000	- Efisiensi Belanja Alat Listrik Rp. 948.000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000	701,500,000	851,500,000	596,093,700	70.01	90.00	255,406,300	- Belanja Laptop Rp. 54.000.000 - Komputer PC Rp. 187.000.000
									- Hardisk Rp. 6.000.000 - Efisiensi 8.406.300

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000	-	5,000,000	4,860,000	97.20	100.00	140,000	Efisiensi Belanja Kulkas Rp. 140.000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000	-	40,000,000	27,864,000	69.66	100.00	12,136,000	Surat kabar/Majalah Rp. 12.136.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	90,000,000	50,000,000	140,000,000	119,812,000	85.58	100.00	20,188,000	Makan dan Minum Rp. 20.188.000
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150,000,000	(6,800,000)	143,200,000	140,195,428	97.90	100.00	3,004,572	Dalam Daerah Rp. 2.500.000 Luar Daerah Rp. 490.572
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1,927,200,000	39,200,000	1,966,400,000	1,948,700,000	99.10	100.00	17,700,000	Gaji TKK Rp. 17.700.000
13	Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintahan	-	50,000,000	50,000,000	48,550,000	97.10	100.00	1,450,000	Efisiensi Rp. 1.450.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	534,969,500	92,050,000	627,019,500	545,787,243	87.04	100.00	81,232,257	-
14	Pengadaan Meubelair	150,000,000	92,050,000	242,050,000	237,025,000	97.92	100.00	5,025,000	Efisiensi Meubelair Rp. 5.025.000
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50,000,000	-	50,000,000	49,074,000	98.15	100.00	926,000	Efisiensi Pemeliharaan Gedung Rp. 926.000
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	229,969,500	-	229,969,500	169,180,743	73.57	100.00	60,788,757	BBM, Suku Cadang, STNK Rp. 60.788.757
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	50,000,000	-	50,000,000	43,452,000	86.90	100.00	6,548,000	Bibit tanaman dan Pemeliharaan Gedung Rp. 6.548.000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	55,000,000	-	55,000,000	47,055,500	85.56	100.00	7,944,500	Pemeliharaan Rutin Rp. 7.944.500

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	266,500,000	150,000,000	416,500,000	405,936,000	97.46	100.00	10,564,000	
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	141,500,000	54,000,000	195,500,000	193,750,000	99.10	100.00	1,750,000	Efisiensi Rp. 1.750.000
20	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	70,000,000	96,000,000	166,000,000	161,680,000	97.40	100.00	4,320,000	Efisiensi Rp. 4.320.000
21	Pengadaan Pakaian Olah Raga	55,000,000	-	55,000,000	50,506,000	91.83	100.00	4,494,000	Efisiensi Pakaian Olahraga Rp. 4.494.000
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	-	30,000,000	24,130,000	80.43	100.00	5,870,000.00	-
22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30,000,000	-	30,000,000	24,130,000	80.43	100.00	5,870,000	Bimbingan Teknis Rp. 5.870.000
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	111,000,000	-	111,000,000	104,734,000	94.35	100.00	6,266,000	-
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	-	10,000,000	9,000,000	90.00	100.00	1,000,000	Penggandaan Rp. 1.000.000
24	Penyusunan Laporan Keuangan	101,000,000	-	101,000,000	95,734,000	94.79	100.00	5,266,000	Uang lembur dan Fotocopy Rp.4.298.000
F	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	1,664,600,000	250,000,000	1,914,600,000	1,683,136,151	87.91	100.00	231,463,849	-
25	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008	432,000,000	250,000,000	682,000,000	580,197,625	85.07	100.00	101,802,375	Efisiensi belanja peralatan dan mesin Rp. 101.802.375, terdiri dari - Belanja Cetak Rp. 7.013.200 - Makan dan Minum Rp. 5.000.000 - Tenaga Ahli Rp. 37.000.000 - Belanja Modal ABT Rp. 52.789.175

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

26	Sosialisasi SOP Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi	180,000,000	-	180,000,000	175,765,000	97.65	100.00	4,235,000	Efisiensi Rp. 4.235.000, terdiri dari : - Honor Pejabat Pengadaan Rp. 900.000 - Honor Tim Pemeriksa Rp. 1.680.000 - Belanja Dokumen Rp. 700.000 - Belanja Penggandaan Rp. 755.000 - Belanja Dokumentasi Rp. 200.000
27	Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi	50,000,000	-	50,000,000	48,530,000	97.06	100.00	1,470,000	Efisiensi Belanja Cetak Rp. 1.470.000
28	Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008	238,500,000	-	238,500,000	168,391,996	70.60	100.00	70,108,004	Honor tenaga ahli tidak bisa diserap karena sudah ada di Keg. Pengembangan Sistem Informasi sebesar Rp. 14.700.000 Efisiensi Internet Rp. 36.820.000 Efisiensi belanja peralatan dan mesin Rp. 18.588.004
29	Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008	270,000,000	-	270,000,000	241,890,000	89.59	100.00	28,110,000	Efisiensi Rp. 28.110.000, terdiri dari : - Penggandaan Rp. 3.565.000 - Makan minum Rp. 6.715.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

									- Sewa Ruang Rp.16.950.000 - Uang Transport Rp. 880.000
30	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu	381,600,000	-	381,600,000	369,071,530	96.72	100.00	12,528,470	- Efisiensi belanja komputer Rp. 12.528.470
31	Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT	112,500,000	-	112,500,000	99,290,000	88.26	100.00	13,210,000	- Efisiensi Rp. 13.210.000, terdiri dari : - Makan minum Rp. 1.410.000 - Sewa ruang Rp. 11.800.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		6,055,150,000	1,604,596,099	7,659,746,099	6,753,828,840	88.17	98.24	905,917,259	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		7,607,259,000	-	7,607,259,000	7,114,193,549	93.52	100.00	493,065,451	
TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG		13,662,409,000	1,604,596,099	15,267,005,099	13,868,022,389	90.84	99.12	1,398,982,710	

Tabel 2.1.1.1.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN
PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS S.D TAHUN 2016
KOTA BEKASI

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI										LEMBAR :			
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Wajib									
1	20			Bidang Urusan wajib otonomi daerah,pemerintahan umum,administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian dan Persandian									
				Program Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah	Hasil Survei IKM Pelayanan Perizinan	82,50%	82%	82,05%	82,07%	-	82,10%	82,10%	82,10%
				Kegiatan Maintenance Sertifikasi ISO 9001:2008	1. Terlaksananya Pemeliharaan Serifikasi ISO 9001:2008	1 Sertifikat ISO 9001:2008	-	-	-	-	-	1 Sertifikat ISO 9001:2008	100%
				Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Perizinan	1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	88 orang	-	-	-	-	-	88 orang	100%

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :				
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Kegiatan Koordinasi dengan SKPD Teknis tentang Pelayanan Perizinan	1. Dokumen laporan penerbitan dan realisasi Perizinan dan non perizinan	36 buku	-	-	-	-	-	36 buku	100 %
					2. Dokumen Berita acara tim teknis	48 buku	-	-	-	-	-	48 buku	100%
				Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan IT	1. Terpeliharanya Aplikasi SIMYANDU BPPT Kota Bekasi	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	100%
					2. Terpeliharanya Aplikasi Access Control Security dan Absensi Sistem	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	100%
					3. Terpeliharanya Modul Dashboard dan Aplikasi SMS gateway Simyandu BPPT	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	100%
					4. Terpeliharanya	1Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	100%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :				
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Aplikasi SIMYANDU Kios-K Outdoor					-			
				Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Terlaksananya Sosialisasi di Pusat Perbelanjaan Terlaksananya Sosialisasi di kecamatan se-Kota Bekasi	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	100%
					2. Tersedianya Kios-K Outdoor	7 Unit	-	-	-	-	-	7 Unit	100%
					3. Terlaksananya Survey IKM	300 responden	-	-	-	-	-	300 Responden	100%
					4. Terlaksananya Media Informasi dan Publikasi	1 paket	-	-	-	-	-	1 paket	100%
				Kegiatan Penataan Ruang Kantor dan Pengadaan	1. Tertatanya Ruang Pelayanan	1 paket	-	-	-	-	-	1 paket	100%

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :				
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				sarana Pendukung pada DPMPTSP	Perizinan					-			
					2. Tersedianya Perencanaan Teknis, pemeliharaan Gedung	1 paket	-	-	-	-	-	1 paket	100%
					3. Tersedianya Filling Cabinet	3 Unit	-	-	-	-	-	3 Unit	100%
					4. Tersedianya Kursi Tunggu	4 unit	-	-	-	-	-	4 unit	100%
					5. Tersedianya Meja penulisan	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	100%
					6. Tersedianya Meja Penerima Tamu	1 Unit	-	-	-	-	-	1 unit	100%
					7. Tersedianya Lemari Arsip	3 unit	-	-	-	-	-	3 Unit	100%
				Kegiatan Pengadaan Sarana									

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :				
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Tersedianya Komputer	5 unit	-	-	-	-	-	5 unit	100%
				2. Tersedianya Notebook	2 unit	-	-	-	-	-	2 unit	100%	
				3. Tersedianya AC	5 unit	-	-	-	-	5 unit	100%		
					19 unit	-	-	-	-	19 unit	100%		
				4. Tersedianya Printer		-	-	-	-	3 unit	100%		
				5. Tersedianya Scanner	3 unit	-	-	-	-	3 unit	100%		
				6. Tersedianya CupBoard	3 unit	-	-	-	-	1 unit	100%		
				7. Tersedianya 1 KVM Swith	1 unit	-	-	-	-	2 unit	100%		
				8. Tersedianya 1 Trolley LCD Proyektor	2 unit	-	-	-	-	-	2 unit	100%	

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :				
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	Hasil Survey IKM Pelayanan Perizinan	83,5%	82%	82,05%	82,07%		82,10%	82,10%	100%
				Kegiatan Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif	1. Filling Kabinet	6 Unit	6 Unit	-	-	-	-	-	-
					2. AC	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	-
					3. Komputer	2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-
					4. Scanner	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	-
					5. Mobile File	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
					6. Rak Arsip	20 unit	20 unit	-	-	-	-	-	-
					7. Pengadaan Ruang Arsip	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Bestrandar ISO 9001: 2008	1. Aplikasi Simyandu, Modul Dashboard & SMS Gate Way, Kios-K dan Web Profile dan Aplikasi	5 Paket	1 paket	1 Aplikasi online dengan SKPD Teknis	1 Aplikasi online dengan SKPD Teknis	-	-	2 paket	-

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :								
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN					
								TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
				Kegiatan Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Bestrandar ISO 9001	Pendaftaran Perizinan Online					-							
					2. Maintenance Surveillance ISO 9001:2008	5 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	2 paket	-				
					1. BA Tim Teknis	240 buku	48 Buku	-	-	-	48 buku	96 Buku	-				
					2. Laporan Penerbitan dan Realisasi Penerimaan Izin dan Non Perizinan	5 buku	1 buku	12 bulan	12 bulan	-	1 buku, 12 bulan	2 buku, 24 bulan	-				
					3. Dokumen Izin	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	-				
					1. Renstra	5 buku	1 buku	-	-	-	-	1 buku	-				
					2. Renja	5 buku	1 buku	-	-	-	-	1 buku	-				
					3. Lakip	5 buku	1 buku	-	-	-	-	1 buku	-				

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI								LEMBAR :		
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT AT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		4. IKM	5 buku	2 buku	-	-		-	2 buku	-
		5. Laporan Evaluasi pengaduan dan hasil IKM	5buku	1 buku	-	-		-	1 buku	-
		1. Renstra	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	1 buku	3 buku	-
		2. Renja	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	1 buku	3 buku	-
		3. Lakip	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	1 buku	3 buku	-
		4. Hasil survei IKM	5 buku	2 buku	2 buku	2 buku		2 buku	6 buku	-
		1. Komputer	22 unit	22 unit	2 unit	-	-	1 Paket	-	-
		2. Note Book	34 unit	34 unit	-	-	-	-	-	-
		3. Server	1 paket	-	-	-	-	-	-	-
		4. Teralis gedung kantor (pengadaan pengkatan dan pemasangan)	1 paket	-	1 paket	1 paket	-	-	-	-

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT AT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		5. Printer 6. Scanner 7. Security sistem 8. Celling call 9. Lemari loket	3 unit 2 unit 3 buah 3 buah 20 unit	- - - -	3 unit 2 unit 3 buah 3 buah	3 unit 2 unit 3 buah 3 buah	-	10 unit 20 unit - - 20 unit	13 unit 22 unit - - 22 unit	-- - - -
	Kegiatan Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. SOP review 2. Leafleat 3. Kepwal SOP 4. Media Radio/massa 5. Sosialisasi SOP 6. Workhop 7. Talk Show	43 izin 6000 fleaf 5 KEPWAL 6 kali 4kali 2kali 2 Kali	43 izin 2000 Leafleat 1 kepwal 1 kali - - -	-	-	100%	- 2000 Leafleat - 20 kali 150 orang - 8 kali	- 4000 leaflet 1 kepwal 22 kali 150 orang - 8 kali	- - - - - -

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :				
KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Kegiatan Pembangunan Data Base Perizinan	8. Sosialisasi terhadap masyarakat	12 kecamatan	-	12 kecamatan	12 kecamatan	-	100 orang	100 orang, 12 kecamatan	-
					9. Video profile bppt	1 video profile	-	-	-	-	1 video profile	1 video profile	-
					Data Base Perizinan	Data Base Perizinan	-	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan Reviu dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi	Revisi SOP, Evaluasi SOP	1 Dok SOP, 1 Dok Evaluasi SOP	-	1 Dok SOP Perizinan	1 Dok SOP Perizinan	-	1 Dok SOP, 1 Dok Evaluasi SOP	2 Dok SOP, 1 Dok Evaluasi SOP	-
				Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008	1. Penambahan Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis izin dan non izin	- 1Sistem Penambahan Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis izin dan non izin	1 Sistem	-	-	-	-	1 Sistem	-

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2. Kios-K dan Web Frofile (pendaftaran online)	- 1 sistem Kios-K dan Web Frofile (pendaftaran online)	-	-	-	-	-	-	-
		3. Pelatihan IT	- 7 orang Pelatihan IT	-	-	-	-	-	-	-
		4. Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah	- 1 sistem Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
		5. Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43 jenis izin dan non izin	- 1 sistem Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43 jenis izin dan non izin	-	-	-	-	-	-	-

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI									LEMBAR :	
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2013-2018.	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Tahun 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN - 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		6. Pemeliharaan Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah	- 1 sistem Pemeliharaan Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
		7. Sertifikasi/Surveillan ISO 9001:2008	1 Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008	1 paket Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008	1 paket Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008	1 paket Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008	100%	1 paket Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008	-	-
		8. Disaster Recovery Center	1 Disaster Recovery Center	1 paket Disaster Recovery Center	1 paket Disaster Recovery Center	1 paket Disaster Recovery Center	100%	1 paket Disaster Recovery Center	3 paket Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008	-

2.1.1.2 Program Kegiatan di lingkungan Bagian KSI Setda Kota Bekasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- 1) Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi
- 2) Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 3) Pemeliharaan Website SIID;
- 4) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama;
- 5) Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
- 6) Persiapan Pembangunan SPAM Pondokgede - Jatiasih Melalui Pola KPS (Kerja Sama Pemerintah - Swasta);
- 7) Kajian Investasi Unggulan;
- 8) Penilaian Perusahaan PMA/PMDN di Kota Bekasi;
- 9) Grand Desain Kerja Sama Daerah;
- 10) Peta Penanaman Modal;
- 11) Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum Apeksi.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung APBD Bagian KSI Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 merencanakan 1 Program dengan 11 (Sebelas) Kegiatan Belanja Langsung APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 total keseluruhan Belanja langsung adalah 2.294.200.000,- (Dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dapat disampaikan dalam tabel 2.1.1.2 uraian Belanja Langsung APBD Kpada Bagian Ksi Setda Kota Bekasi sebagai berikut :

TABEL 2.1.2.1

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2016
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BULAN DESEMBER 2016

NO	BIDANG, UNIT KERJA, PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI					KET
			S/D bln lalu	bln ini	S/D bln ini	KEU (%)	FISIK (%)	
			(Rp.)	(Rp.)	NOMINAL			
1	2	3	11	12	13=(11+12)	14	15	16
	Program Peningkatan promosi dan Kerja Sama Investasi							
1	Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi	Rp 225,000,000.00	160,036,960	22,961,780	182,998,740	81.33	100.00	-
2	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Rp 307,000,000.00	-	255,506,000	255,506,000	83.23	100.00	
3	Pemeliharaan Website SIID	Rp 90,000,000.00	-	89,330,000	89,330,000	99.26	100.00	-
4	Evaluasi Perjanjian Kerja Sama	Rp 135,000,000.00	128,326,593	-	128,326,593	95.06	100.00	
5	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah	Rp 90,000,000.00	73,344,000	-	73,344,000	81.49	100.00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

6	Persiapan Pembangunan SPAM Pondokgede - Jatiasih Melalui Pola KPS (Kerja Sama Pemerintah - Swasta)	Rp -	-	-	-	0.00	100.00	
7	Kajian Investasi Unggulan	Rp 270,000,000.00	-	261,614,000	261,614,000	96.89	100.00	
8	Penilaian Perusahaan PMA/PMDN di Kota Bekasi	Rp 97,200,000.00	69,290,000	7,807,000	77,097,000	79.32	100.00	
9	Grand Desain Kerja Sama Daerah	Rp 270,000,000.00	-	265,729,000	265,729,000	98.42	100.00	
10	Peta Penanaman Modal	Rp 180,000,000.00	-	164,940,000	164,940,000	91.63	100.00	
11	Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum Apeksi	Rp 630,000,000.00	483,167,500	45,988,900	529,156,400	83.99	100.00	
	TOTAL DANA	Rp 2,294,200,000.00	914,165,053	1,113,876,680	2,028,041,733	88.40	100.00	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN BAGIAN KSI SETDA KOTA BEKASI

Kinerja yang telah dicapai pemerintah Kota Bekasi berupa pencapaian sasaran yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. Sesuai Peraturan yang menjadi dasar terhadap capaian kinerja adalah kinerja pelayanan BPPT Kota Bekasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Sasaran yang ditetapkan dalam Tapkin terutama target tahun 2016 sebanyak 1 (satu) buah sasaran. Dengan rincian sebagai berikut :

PAGU ANGGARAN 2016 : Rp. 13.662.409.000

PAGU ABT 2016 : Rp. 1.604.596.099

TOTAL : Rp. 15.267.005.099

Dengan rincian :

- Pagu BL + ABT : Rp. 7.659.746. 099

- Pagu BTL (Gaji) : Rp. 7.607.259.000

- Realisasi BL dan BT L : Rp. 13.868.022.389 Keu (90,84%) Fisik (99,12%)

- Sisa Anggaran : Rp. 1.398.982.710

Untuk mecapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada RENSTRA BPPT yang terdapat pada tabel berikut ini :

I. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPPT PADA RPJMD 2013 – 2018

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2015 (Kota Bekasi)	Realisasi 2015 (BPPT)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	82,30%

II. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD BPPT PADA RPJMD
2013-2018

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2016	Realisasi 2016
1	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	82,05%	82,07%

2.4.2 Kinerja yang telah dicapai pemerintah Kota Bekasi berupa pencapaian sasaran yang menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Sesuai Peraturan yang menjadi dasar terhadap capaian kinerja adalah kinerja pelayanan BPPT Kota Bekasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Sasaran yang ditetapkan dalam Tapkin terutama target tahun 2016 sebanyak 1 (satu) buah sasaran. Dan Pencapaian sasaran Kinerja Pada Bagian KSI Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI TAHUN 2016

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2015 (THN N-1)	TAHUN 2016 (TNN N)	TAHUN 2017 (THN N+1)	TAHUN 2015 (THN N)	TAHUN 2016 (THN N+1)	TAHUN 2017 (THN N+1)	TAHUN 2017 (TNN N)	TAHUN 2018 (THN N+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	(KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 060/Kep.506-BPPT/XII/2012 TENTANG Perubahan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 TENTANG PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Kegiatan Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 1. SOP Review dan Kepwal tentang SOP 2. Leaflet 3. Buku Saku 4. Talk Show Radio 5. Radio Spot /Iklan 6. Media Massa 7. Sosialisasi SOP terhadap Aparatur 8. Sosialisasi Perizinan terhadap masyarakat 9. Spanduk 10. Banner 11. Baliho 12. Video Profile	82%	82,05%	82,05%	82%	82,05%	82,10%	82,10%	82,50%	- Honorarium pejabat pengadaan barang Rp. 4.035.00
				2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
				1000	2000	2000	1000	2000	2000	2000	2000	
				10	10	10	10	10	8	8	8	
				20	20	20	20	20	15	15	15	
				10	10	10	10	10	10	10	10	
				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	150	150	150	
				150	150	150	150	150	100	100	100	
				100	100	100	100	100	100	100	100	
				2 spanduk	10 spanduk,	10 spanduk,	2 spanduk	10 spanduk,	10 Spanduk	10 Spanduk	10 Spanduk	
					4 banner	4 banner		4 banner	4 Banner	4 Banner	4 Banner	
					2 baliho	2 baliho		2 baliho	2 Baligho	2 Baligho	2 Baligho	
				1	1 video profile	1 video profile	1	1 video profile	1 video profile	1 video profile	1 video profile	

			Kegiatan Review dan penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 1. Review terhadap SOP Perizinan 2. Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan Kegiatan Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008 1. Dokumen izin 2. Rekapitulasi dan Relisasi laporan penerbitan izin Kegiatan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu 1. Renstra 2. Renja 3. Lakip 4. IKM 5. Laporan penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan (12 Bulan)		1 dok 1 dok 12 dok 1 dok 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 12 dokumen	1 dok 1 dok 12 dok 1 dok - - - - -	1 dok 1 dok 12 dok 1 dok - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 12 dokumen	1 dok 1 dok 12 dok 1 dok - - - - -	1 1 12 dok 1 dok - - - - -	1 1 12 dok 1 dok - - - - -	1 1 12 dok 1 dok - - - - -	- Efisiensi Belanja Cetak Rp. 1.470.000 <
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan kinerja BPPT									
			1.. Revisi Renstra BPPT Tahun 2013-2018	-	-	-	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	
			2. Penyusunan LAKIP	-	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	
			3. Penyusunan Renja BPPT	-	- 1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
			3. Penyusunan IKM BPPT	-	2 dok	-	2 dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok	
			4. Penyusunan Laporan Penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	-	12 Dok	-	12 Dok	2 dok	2 dok	-	-	
			5.. Penyusunan Renstra BPPT Tahun 2019-2024		-		-	1 Dok	2 dok		1 Dok	
			Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan data Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008									
			1.. Penambah an Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis izin dan non izin	1 sistem	-	-	1 sistem	-	-	-	-	
			2. Kios-K dan Web Frofile (pendaftaran online)		-	-	1 sistem	-	-	-	-	
												- Efisiensi Rp. 13.210.000
												honor tenaga ahli tidak bisa diserap karena sudah ada di Keg. Pengembangan Sistem Informasi sebesar Rp.

					-	-	7 org	-	-	-	-	14.700.000
					-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	
			3. Pelatihan IT									
			4. Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah	1 sistem	-	-	-	-	-	-	-	
			5. Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43 jenis izin dan non izin	7 org 1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	
			6. Pemeliharaan Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah	-	- 1 paket Surveillance ISO 9001:2008	1 paket Surveillance ISO 9001:2008	1 Sertifikasi ISO 9001:2008	- 1 paket Surveillance ISO 9001:2008	1 paket Surveillance ISO 9001:2008	1 paket Surveillance ISO 9001:2008	-	
			7. Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008	-	- 1 DRC	- 1 DRC	-	- 1 DRC	- 1 DRC	- 1 DRC	-	
			8. Disaster Recovery Centre (DRC)	1 Sertifikasi ISO 9001:2008								
				-	-1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis	-	-	-1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis	- 1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis	- 1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis	-	
						-1 modul dashboard	-	-	-	-	-	
						-1 Sms Gateway	-	-	-	-	-	
						-1 Web Profile (pendaftaran online)	-	-	-	-	-	

			Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008	-	- 1 sistem Pelaporan	-	- 1 sistem	- 1 sistem Pelaporan	- 1 sistem Pelaporan	- 1 sistem Pelaporan	-	
			1. SIMYANDU	-	-	- 1 Sertifikasi ISO 9001:2008	- 1 Sertifikasi ISO 9001:2008	- 1 Sertifikasi ISO 9001:2008	1 Sertifikasi ISO 9001:2008	1 Sertifikasi ISO 9001:2008	-	
			2. Modul Dashboard	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Sms Gateway	-	-	-	-	-	-	-	-	
			9. Web Profile (pendaftaran online)	-	-	-	-	-	-	-	-	
			10. Pembangunan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin	1 sistem	-	-	-	-	-	-	1 Sistem	
			11. Sertifikasi/Surveillan ce ISO 9001:2008	- 1 sistem	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Pembangunan Data Base Perizinan	-	-	-	22 unit Komputer - 4 Unit Netbook - 1 paket server	-	-	-	-	
			12. Data Base perizinan	-	-5 unit	-	-	-5 unit	-	-	-	
			Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan data	-	-	1 paket pengecatan	-	-	1 paket pengecatan dan	1 paket pengecatan dan	1 paket pengecatan dan penyekatan dinding	

2.	Jumlah Perjanjian Kerjasama Investasi		Base perizinan	-		dan penyekatan dinding	-		penyekatan dinding	penyekatan dinding	-	
			13.Data Base perizinan	-			-					
			Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	-	1 Paket	-		1 Paket	-	-		
				-								
			14. Komputer		1 Paket	-	-	1 Paket	-	-		
			15. Notebook									
			16. Server									
			17. Pengembangan Sarana Ruang Pelayanan/Front Office dan Ruang Rapat	-	5 Event	5 Event	5 Event	5 Event		5 Event	5 Event	
			18. Pengadaan Perlengkapan Kantor		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	5 Event	50 Orang	50 Orang	
			19. Mobil Keliling dan Sarana Pelayanan	5 Event	1 Website	1 Website	1 Website	1 Website	50 Orang	1 Website	1 Website	
			Kegiatan Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-	
					50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang	50 Orang	
			20. Ruang Arsip yang Representatif	1 Website					50 Orang			
			Jumlah Perjanjian Kerjasama Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Promosi Potensi dan Peluang	50 Orang		-	-	-			-	

			Investasi di Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-		
			Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	-		
			Pemeliharaan Website SIID	-	-	-	-	-	-	-		
			Evaluasi Perjanjian Kerjasama	-	-	-	-	-	-	-		
			Peningkatan Kapasitas Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	-		
			Persiapan Pembangunan SPAM Pondokgede-Jatiasih melalui pola KPS (Kerjasama Pemerintah – Swasta)	-	-	-	-	-	-	-		
			Kajian Investasi Unggulan	-	-	-	-	-	-	-		
			Penilaian Perusahaan PMA/PMDN di Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-		
			Grand Design Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	-		
			Peta Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-		
			Paertisipasi dalam penyelenggaraan forum apekti	-	-	-	-	-	-	-		

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI :

2.3.1 Identifikasi Masalah Utama dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi saat ini antara lain:

1. Kompetensi Sumber daya aparatur pelayanan Perizinan yang belum Optimal;
2. Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan di BPPT belum optimal;
3. Sinergitas SKPD Teknis kurang optimal;
4. Belum memiliki Ruang Arsip;
5. Implementasi waktu penyelesaian Proses Perizinan sesuai SOP belum optimal;
6. Belum efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
7. Peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ada yang tumpang tindih dengan SKPD Teknis;
8. Masih ada Peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis;
9. Penerapan informasi teknologi di BPPT Kota Bekasi kurang optimal.

Dengan permasalahan yang dihadapi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi tersebut diatas disimpulkan Isu-isu Strategis sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat tentang layanan BPPT masih rendah;
2. Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif;
3. Penerapan Informasi Teknologi yang belum optimal.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi pada saat ini menjalankan tugasnya sebagai aparaturnya Pelayanan Kepada Masyarakat dalam melayani perizinan dan penanaman modal di Kota Bekasi, adapun Perizinan yang dilaksanakan di BPPT Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.244 –Org/IV/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Camat adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, yang meliputi :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak (Site Plan)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Gangguan
4. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)
5. Izin Usaha Industri (IUI)
6. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
7. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
8. SIUP - MB

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu, yang Meliputi :

1. Izin Trayek Angkutan Kota
2. Izin Usaha Angkutan (SIPA)
3. Izin Penyelenggaraan atau Pemasangan Reklame
4. Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM)
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6. Izin Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C
7. Izin pengemboran Air Bawah Tanah (IP)
8. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA)
9. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
10. Izin Usaha Jasa Kontruksi
11. Izin Usaha Perusahaan Pengeborn Air Bawah Tanah (IUPPAT)
12. Izin Juru Bor Air Tanah (IJBAT)
13. Izin Explorasi Air Bawah Tanah
14. Izin Lingkungan
15. Izin Penyelenggaraan Hiburan

Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, yang Meliputi :

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Pembubaran Perusahaan dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer)
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Meliputi : Tanah, Penggunaan alat berat, panggung reklame, bangunan)
5. Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta
6. Izin Lokasi
7. Izin Pelayanan Kesehatan :
 - 1) Izin Apotek
 - 2) Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat)
 - 3) Izin Optikal
 - 4) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Salon Kecantikan
 - 5) Izin Klinik Kecantikan
 - 6) Izin Laboratorium Klinik Swasta
 - 7) Izin Rumah Bersalin
 - 8) Izin Pengobatan Tradisional
 - 9) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Tukang Gigi
 - 10) Izin Balai Pengobatan
 - 11) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta
 - 12) Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta
8. Izin Prinsip Penanaman Modal
9. Izin Usaha Penanaman Modal
10. Izin Pencabutan dan Penutupan SIUP

Adapun Pelaksanaan Kerjasama dan Investasi yang dilakukan di KSI Setda Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Bagian Kerja sama dan Investasi mempunyai tugas membantu asisten II dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kerjasama dan Investasi yang meliputi kerjasama dan investasi yang meliputi kerja sama antar Daerah dan Lembaga, pengembangan investasi serta peningkatan penanaman Modal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kerjasama dan Investasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian sesuai dengan visi dan misi Daerah
- b. Perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis oleh Walikota di lingkup tugasnya.
- c. Pembina dan pengendalian pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pemberian Pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bagian;
- e. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kerjasama dan investasi yang meliputi kerjasama antar Daerah dan Lembaga, pengembangan investasi serta peningkatan penanaman modal, yaitu :
 1. Fasilitas pelaksanaan pengkajian, pengembangan kerjasama antar Daerah dan lembaga;
 2. Fasilitas pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pengkajian dan pengawasan pengembangan investasi;
 3. Fasilitas pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pengkajian dan penyelenggaraan penanaman modal.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan perangkat Daerah, lembaga/instansi, bagian lainnya terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;
- g. Pembinaan pengembangan karir pegawai lingkup bagian;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
- i. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. Pemberian laporan pertanggung jawaban tugas bagian Kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah dan Asisten Terkait serta laporan Kinerja Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dalam pelaksanaan tupoksinya Bagian KSI mengalami beberapa permasalahan dalam kelembagaan sehingga kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Bagian Kerjasama dan Investasi merupakan organisasi yang menjalankan fungsi untuk melakukan, fasilitasi, koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pengkajian dan pengawasan dalam kerjasama antar daerah, pengembangan investasi dan penanaman modal. Namun karena strukturnya masih dibawah Sekretaris Daerah sehingga kurang efektif dalam menjalankan fungsinya;
2. Bagian Kerjasama dan Investasi belum bisa melaksanakan dan melaporkan SPM yang telah di tetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dikarenakan struktur organisasinya masih di bawah Sekretariat Daerah;
3. Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Sekretaris Daerah Kota Bekasi, masih terdapat tumpang tindih pengertian dan tupoksi antar sub bagian pada Bagian Kerjasama dan Investasi. Sehingga perlu adanya penataan kembali struktur organisasi dengan melakukan penghapusan dan pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru.

Selain dari permasalahan internal diatas, terdapat permasalahan eksternal yang bukan merupakan kewenangan dari sekretariat daerah, yaitu:

- a. Meningkatnya tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang tidak konsisten dan tidak proposional;
- d. Dukungan Stakeholders yang masih rendah;
- e. Regulasi produk hukum.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN BESERTA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI 2013-2018

Dalam rangka mendukung Visi Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sebagai satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal menetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi **“KOTA BEKASI SEBAGAI DAYA TARIK PENANAMAN MODAL DENGAN PELAYANAN PERIZINAN YANG CEPAT, MUDAH DAN TRANSPARAN”** yang mendukung RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 guna mewujudkan Visi Ihsan dan Misi ke-1 tentang tata kelola Pemerintahan yang baik

3.1.1 TUJUAN

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi tahun 2013-2018 dengan target IKM DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2018 adalah 82,50, adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi antara lain :

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Membangun Perekonomian Kota yang maju.

3.1.2 SASARAN

1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik;
2. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 2013-2018

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dan untuk pencapaian target pembangunan telah disusun Arah Kebijakan Umum yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018.

3.2.1 STRATEGI

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Melakukan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
3. Melakukan perencanaan pembangunan ekonomi.

3.2.2 Arah Kebijakan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Arah kebijakan Umum Pembangunan Kota Bekasi 2013-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi terdiri dari 1 Arah Kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Kajian investasi unggulan, penyusunan aturan mengenai penanaman modal, promosi, potensi, investasi;
3. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah terhadap BUMD.

Tabel 3.2
Strategi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
DPMPTSP Kota Bekasi

VISI : KOTA BEKASI SEBAGAI DAYA TARIK PENANAMAN MODAL DENGAN PELAYANAN PERIZINAN YANG CEPAT, MUDAH DAN TRANSPARAN			
MISI : 1. Mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif; 2. Meningkatkan fasilitasi dan promosi penanaman modal; 3. Peningkatan Efektifitas dan Optimalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; 4. Meningkatkan Kualitas Layanan <i>E-Government</i> dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan memiliki Integritas yang Tinggi.			
STRATEGI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; 2. Melakukan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 3. Melakukan perencanaan pembangunan ekonomi.	Tujuan dari misi ke-1 1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; 2. Membangun perekonomian kota yang maju.	1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; 2. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi.	1. Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; 2. Kajian investasi unggulan, penyusunan aturan mengenai penanaman modal, promosi, potensi, investasi; 3. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah terhadap BUMD.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2017 adalah memberikan gambaran tentang rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dan tuntutan dalam penyusunan program berkelanjutan.

Renja ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (Check and balance) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. Rencana Kerja (Renja) diharapkan dapat mengimplementasikan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 2013-2018.

3.4 Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota Bekasi dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Program dan kegiatan yang dirancang DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2018 berpedoman/pada Rencana Strategis DPMPTSP yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Program ini merupakan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan PTSP adalah dengan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan secara

berkala oleh DPMPTSP dalam 1 (satu) Tahun atau 2 semester setiap 6 bulan;

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Program ini merupakan Upaya Meningkatkan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi. Tujuannya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan Pusat.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2017 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bekasi adalah merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPT dan KSI Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Tahun 2013-2018 Kota Bekasi.

Dalam dokumen Renstra tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2016 BPPT dan Bagian KSI Setda memiliki 2 program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang terdiri atas Belanja Langsung Urusan dengan total anggaran sebesar Rp. **4.208.800.000,-** (Empat miliar dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Rencana Capaian Target Kinerja akan di uraikan pada Bab berikutnya dan perbandingan Anggaran pada masing-masing program Tahun 2014, 2015, 2016. Untuk Tahun 2017 dan 2018 Sudah Terjadi Perubahan Struktur Organisasi Sesuai PP Nomor 16 Tahun 2016 menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat dilihat Lihat Tabel 3.4

Tabel 3.4**Tabel Anggaran Program Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018**

NO	PROGRAM	ANGGARAN				
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rp 1.800.000.000	Rp 1.600.000.000,-	Rp 1.914.600.000,-	Rp 2.380.000.000,-	Rp 2.585.000.000,-
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	Rp 2.294.200.000,-	Rp 2.700.000.000,-	Rp 1.500.000.000,-
JUMLAH		Rp 1.800.000.000,-	Rp 1.600.000.000,-	RP 4.208.800.000,-	Rp 5.080.000.000,-	Rp 4.085.000.000,-

3.4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam hal ini untuk memberikan arahan yang lebih jelas dalam penentuan Prioritas Program Kegiatan Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang harus dilaksanakan sesuai Renstra DPMPTSP Kota Bekasi 2013-2018 adalah sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama,

yang terdiri dari :

- 1) Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi;
- 2) Pemeliharaan Website SIID;
- 3) Kajian Analisis Penanaman Modal;
- 4) Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
- 5) Penilaian Perusahaan PMA/PMGN Terbaik di Kota Bekasi;
- 6) Penyelenggaraan Bekasi Summit;
- 7) Sinergitas Pengembangan Promosi/Penanaman Modal dan Kerja Sama Daerah.

B. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, yang terdiri dari :

- 1) Penyusunan Peraturan Walikota Pelayanan Perizinan Online;
- 2) Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online;
- 3) Lanjutan Penataan Ruang dan Pengembangan Sarana Ruang Kantor DPMPTSP;
- 4) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi;
- 5) Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
- 6) Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 7) Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 8) Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja DPMPTSP;
- 9) Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008.

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2017 dan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2018 dilihat Tabel 3.4.1 dan Tabel 3.4.2 sebagai Berikut :

Tabel 3.4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, ADM Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian								
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Nilai Investasi	Kota Bekasi	100	2.700.000.000	APBD		100	2.800.000.000
	Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi	Jumlah Event yang diikuti (tempat tentatif), event De Syukron (Bandung), Event PRJ (Jakarta)	Kota Bekasi	3 Event Lokasi ditentukan oleh BKPM RI dan BPMPT Provinsi Jawa Barat	250.000.000.	APBD		-	-
	Pemeliharaan Website SIID	Jumlah Website yang dipelihara, jasa konsultan	Kota Bekasi	1 Website, 1 Paket	100.000.000			1 Website	150.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kajian Analisis Penanaman Modal	Dokumen Kajian Analisa Penanaman Modal	Kota Bekasi	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000
	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	Kunjungan ke Perusahaan	Kota Bekasi	1 Buku	100.000.000	APBD		1 Buku/ 1 laporan	100.000.000
	Penilaian Perusahaan PMA/PMDN Terbaik di Kota Bekasi	Kunjungan ke Perusahaan PMA, Kunjungan ke perusahaan PMDN, Pemenang Perusahaan terbaik.	Kota Bekasi	10 kali, 10 kali, 5 Perusahaan PMA, 5 Perusahaan PMDN	200.000.000			10 kali, 10 kali, 5 Perusahaan PMA, 5 Perusahaan PMDN	300.000.000
	Penyelenggaraan Bekasi Summit	Temu Investor, Cetak Brosur, Souvenir, Perlengkapan Panitia /eselon II, Narasumber Walikota, Narasumber Gubernur/walqub, Narasumber Provinsi, Narasumber BKPM, Narasumber BPMPT Provinsi, Jasa Event Organizer	Kota Bekasi	200 Pengusaha, 1 Rim, 200 Buah, 66 Buah, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang	600.000.000	APBD		-	-
	Sinergitas Pengembangan Promosi/Penanaman Modal	Jumlah event yg diikuti	Kota Bekasi	2 event	100.000.000			2 Event	300.000.000
	Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	Kota Bekasi	-	-			1 Kali	200.000.000
	Kajian Investasi Unggulan	Jumlah Dokumen Kajian	Kota	-	-			1 Dokumen	300.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Investasi Unggulan	Bekasi						
	Fasilitasi Investasi Penunjang Pameran Indo City Expo 2018	Jumlah Event	Kota Bekasi	-	-			1 Dokumen	750.000.000
	Penyusunan Laporan Bidang SPM Penanaman Modal	Dokumen Laporan SPM Tentang Penanaman Modal	Kota Bekasi	-	-			1 Dokumen	50.000.000
	Penyusunan data base investasi Kota Bekasi	Tersusunnya Data Mengenai Data PMA/PMDM di Kota Bekasi	Kota Bekasi	-	-			1 Database	300.000.000
	Peningkatan kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bimbingan teknis bagi aparatur	Kota Bekasi	50 orang selama 3 hari	100.000.000			-	-
	Partisipasi dalam penyelenggaraan forum apeksi	Jumlah event yang diikuti luar daerah, lokasi baru ditentukan pada saat penutupan forum apeksi tahun sebelumnya	Kota Bekasi	1 event	750.000.000			1 Database	750.000.000
	Evaluasi perjanjian kerjasama	Jumlah buku laporan evaluasi	Kota Bekasi	1 buku	100.000.000			-	-
	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah perjanjian kerjasama yang diawasi dan dievaluasi	Kota Bekasi	5 perjanjian kerjasama	250.000.000			-	-

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 29 34	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan			HASIL SURVEY IKM PELAYANAN PERIZINAN	Kota Bekasi	82,10	2.380.000.000	APBD		82,10	3.300.000.000
3 29 34 1	Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi			SIMYANDU, Database, Arsip Perizinan	Kota Bekasi	1 Paket database, 1 Paket sistem	200.000.000	APBD		1 Paket, 1 Paket	300.000.000
3 29 34 2	Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi			Leaflet, Buku Saku, Talk Show Radio, Radio Spot, Sosialisasi SOP terhadap Aparatur, Sosialisasi Perizinan terhadap Masyarakat, Video Profil BPPT	Kota Bekasi	2000 eksemplar, 2000 Buku, 8 kali Tayangi, 20 kali tayang, 150 Orang, 100 Orang, 1 Video Profil	330.000.000	APBD		2000 eksemplar, 2000 Buku, 8 kali Tayangi, 20 kali tayang, 150 Orang, 100 Orang, 1 Video Profil	350.000.000
3 29 34 3	Reviu dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi			Revisi SOP,Evaluasi SOP	Kota Bekasi	1 Dok SOP, 1 Dok Evaluasi SOP	50.000.000	APBD		1 Dok SOP, 1 Dok Evaluasi SOP	100.000.000
3 29 34 4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu			Komputer, Printer, Scanner, Lemari Locker, Server, Lemari Arsip (mobile compact)	Kota Bekasi	1 paket,10 Unit, 20 Unit, 20 unit, 4 unit, 1 unit	500.000.000	APBD		20 unit,20 unit,10 unit,1 paket,1 Unit,4 Unit	100.000.000.
3 29 34 5	Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT			Renstra 2013-2018, Renja BPPT 2018, Lakip 2017, IKM 2017, Laporan Realisasi	Kota Bekasi	1 Dokumen,1 Dokumen,12 Dokumen,1 Dokumen, 1	50.000.000	APBD		1 Dokumen,1 Dokumen,1 Dokumen,2 Dokumen, 12	200.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Penerbitan Izin dan Non Izin		Dokumen				Dokumen	
3	29	34	6		Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008	Dokumen Izin, Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penerbitan Izin dan non izin	Kota Bekasi	12 dokumen), 1 dokumen)	250.000.000	APBD		12 Bln (12 dokumen), 12 bln (12 dokumen)	350.000.000
					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008	Simyandu, Modul Dashboard, SMS Gateway, Web Profile, Pengembangan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin, sertifikasi ISO 9001:2008	Kota Bekasi	-	-	APBD		Simyandu, Modul Dashboard, SMS Gateway, Web Profile, Pengembangan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin, sertifikasi ISO 9001:2008	150.000.000
					Penyusunan Peraturan Walikota Pelayanan Perizinan Online	1 Dokumen peraturan Walikota	Kota Bekasi	1 dokumen perwal	250.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
					Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online	perubahan flow bisnis proses pada simyandu, pembuatan aplikasi berbasis android/IOS, komputer, tablet, scanner, server	Kota Bekasi	1 sistem perubahan flow bisnis proses pada simyandu, 1 sistem pembuatan aplikasi berbasis	750.000.000	APBD		1 Sistem Perubahan flow bisnis proses pada Simyandu,	750.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							android/IOS, 20 komputer, 50 tablet, 5 scanner, 1 server				1 sistem pembuatan aplikasi berbasis	
				Lanjutan Penataan Ruang dan Pengembangan Sarana Ruang Kantor	Terwujudnya penataan ruang dan Pengembangan sarana ruang kantor (lanjutan)	Kota Bekasi	-	-	APBD		Penataan ruang dan pengembangan sarana ruang kantor	500.000.000
				Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Lingkungan Front Office	Petugas Front office	Kota Bekasi	-	-	APBD		13 orang Petugas Front Office	350.000.000
3	29	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Surat dinas, komunikasi, penerangan bangunan kantor, ATK, Cetakan, bahan bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bekasi	100%	5.052.300.000	APBD		100%	3.202.200.000
3	29	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyampaian surat-surat dinas	Kota Bekasi	6 orang	5.000.000	APBD		100%	5.000.000
3	29	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, telp,faksmili, Listrik dan internet	Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	14 jenis barang	400.000.000	APBD		100%	500.000.000
3	29	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor	Kota Bekasi	3 orang	120.000.000	APBD		100%	120.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 29 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Bekasi	59 jenis	350.000.000	APBD		100%	400.000.000
3 29 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Bekasi	80 barang	500.000.000	APBD		100%	500.000.000
3 29 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	14 jenis barang	10.000.000	APBD		100%	15.000.000
3 29 1 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bekasi	6 jenis	304.000.000	APBD		100%	250.000.000
3 29 1 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Bekasi	2 unit	8.000.000	APBD		100%	5.000.000
3 29 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	Kota Bekasi	564 eksemplar	40.000.000	APBD		100%	40.000.000
3 29 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman yang dibutuhkan	Kota Bekasi	7 jenis	90.000.000	APBD		100%	90.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 29 1 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun	Kota Bekasi	112 orang	150.000.000	APBD		100%	150.000.000
3 29 1 19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Kota Bekasi	47 orang	2.880.300.000	APBD		100%	1.027.200.000
3 29 1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Ters	Kota Bekasi	1 paket	150.000.000	APBD		100%	100.000.000
3 29 1 31	Penataan arsip		Kota Bekasi		45.000.000	APBD		100%	100.000.000
3 29 2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung, meubelair, pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Bekasi	100%	649.685.000	APBD		100%	509.000.000
3 29 2 10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya pengadaan meubeler	Kota Bekasi	4 jenis	150.000.000	APBD		100%	100.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 29 2 5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kota Bekasi	2 unit	46.000.000	APBD		100%	-
3 29 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Bekasi	1 gedung	100.000.000	APBD		100%	50.000.000
3 29 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kota Bekasi	9 mobil dan 2 motor	223.685.000	APBD		100%	229.000.000
3 29 2 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksanya perlengkapan gedung kantor	Kota Bekasi	5 jenis	75.000.000	APBD		100%	75.000.000
3 29 2 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Bekasi	6 jenis	55.000.000	APBD		100%	55.000.000
3 29 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian dinas beserta berlengkapannya, pakaian olahraga, pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Bekasi	100%	275.000.000	APBD		100%	275.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	29	3	2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Bekasi	130 orang	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
3	29	3	6		Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olahraga	Kota Bekasi	130 orang	75.000.000	APBD		100%	75.000.000
3	29	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keikutsertaan diklat	Kota Bekasi	100%	90.000.000	APBD		100%	200.000.000
3	29	5	1		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan dalam diklat	Kota Bekasi	30 orang	90.000.000	APBD		100%	200.000.000
3	29	6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan	Kota Bekasi	100%	101.000.000	APBD		100%	111.000.000
3	29	6	1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Kota	4 laporan	10.000.000	APBD		100%	10.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Realisasi Kinerja SKPD	kinerja SKPD yang akuntabel	Bekasi						
3	29	6	2		Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan laporan keuangan	Kota Bekasi	15 Laporan	91.000.000	APBD		1 Laporan	101.000.000

TABEL 3.4.2
RENCANA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LATAR BELAKANG MASALAH/DASAR HUKUM	TUJUAN	SASARAN	BENTUK/RIN CIAN KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan								Rp. 3.300.000.000
1.	Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	<p>Pemahaman masyarakat terhadap perizinan masih rendah</p> <p><u>Dasar Hukum</u></p> <p>Keputusan Walikota Nomor : 060/Kep.513-BPPT/XI/2016 tentang Standar Operating Procedure Perubahan Keempat terhadap Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2016 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi</p>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perizinan Terhadap Masyarakat, - Sosialisasi SOP terhadap Aparatur, - Video Profile BPPT, - Radio Spot, - TalkShow Radio, - Buku saku, Leaflet, - Media Massa, - Spanduk, - Banner, - Baligo 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 orang, - 1 Video, - 15 kali tayang, - 2.000 buku saku, - 2.000 Leaflet, - 10 Media Massa, - 10 Spanduk, - 4 banner, - 2 Baligo 	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp. 350.000.000.

2.	<p>2</p> <p>Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meminimalisasikan terjadinya proses penyalahgunaan Keuangan Negara atau tindak Pidana Korupsi - Meningkatkan Produktifitas dan kinerja <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tatakerja unit Pelayanan Perizinan terpadu di daerah Bab V pasal 2 " Pegawai yang ditugaskan pada Badan/ Kantor sebagaimana tertera pada ayat (1) dapat di berikan tunjangan khusus/ Insentif sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah 	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Izin - Rekapitulasi dan realisasi laporan penerbitan izin 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 dokumen - 1 dokumen 	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp. 350.000.000.
3.	<p>Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan <i>Good Governance</i> diperlukannya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.</p> <p>Dasar Hukum</p> <p>Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pp Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</p>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Renstra 2013 - 2018, - Lakip Tahun 2018, - Laporan Realisasi Penerbitan izin dan Non Izin, - Penyusunan IKM BPPT Tahun 2018 - Renja BPPT Tahun 2019, 	<p>1 Dokumen,</p> <p>1 Dokumen,</p> <p>12 Dokumen,</p> <p>1 Dokumen IKM BPPT Tahun 2018 (2 Semester),</p> <p>1 Dokumen,</p> <p>1 Dokumen.</p>	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp. 200.000.000.

					- Penyusunan Renstra BPPT Tahun 2009-2024			
4.	Pemeliharaan dan Pengelolaan Database Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Untuk perlindungan dan pengamanan data. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Database ini dirasakan sangat bermanfaat dan memudahkan serta kecepatan dalam mencari informasi tersebut, serta dapat meningkatkan kinerja yang efisien dan efektif dalam mencari informasi tersebut, serta dapat meningkatkan kinerja yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal <p>Dasar Hukum Undang –undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Sistem Database Perizinan	- 1 Sistem Database Perizinan	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp.150.000.000.

5	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008	<p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Surat Edaran Walikota Bekasi nomor 485/1260/org tentang Pelayanan Publik 	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Simyandu, Modul dasbord, SMS Gateway, Web Profile, Pengembangan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin, Sertifikasi ISO 9001:2008	1 Simyandu, 1 Modul dasbord, 1 SMS Gateway, 1 Web Profile, 1 Pengembangan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin, 1 Sertifikasi ISO 9001:2008	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp 150.000.000
6	Reviu dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	<p>Penyelesaian proses perizinan dalam implementasi SOP masih kurang optimal.</p> <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PERDA Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.454- 	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Evaluasi SOP, - Revisi SOP	- 1 dok - 1 dokumen	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp. 100.000.000

		BPPT/XII/2014 tentang tatacara Proses pemberian Izin / Standart Operating Procedure (SOP) dilingkungan BPPT.						
7	Penyusunan Peraturan Walikota Pelayanan Perizinan Online	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka Pengembangan sistem pelayanan perizinan Online maka dibutuhkan suatu Peraturan Walikota sebagai dasar hukum pelaksanaan tersebut mewujudkan <i>Good Governance</i> dan E-Governance diperlukannya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. 	Terwujudnya Peraturan Walikota Perizinan online	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	- 1 Dokumen peraturan Walikota	- 1 Dokumen	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp. 100.000.000
8	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Rangka Lanjutan pengembangan sistem pelayanan perizinan online 	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Flow Bisnis proses pada simyandu, pembuatan aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sistem Perubahan flow bisnis proses pada Simyandu, 1 sistem pembuatan aplikasi berbasis 	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp. 750.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

9	Lanjutan Penataan Ruang dan Pengembangan Sarana Ruang Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penataan ruang dan Pengembangan sarana ruang kantor (lanjutan) 	- Terwujudnya penataan ruang dan Pengembangan sarana ruang kantor.	- indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Penataan ruang dan pengembangan sarana ruang kantor	- Penataan ruang dan pengembangan sarana ruang kantor	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp. 500.000.000
10	Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Surat Edaran Walikota Bekasi nomor 485/1260/org tentang Pelayanan Publik 	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	- indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Database arsip perizinan, SIMYANDU	- 1 Database, 1 sistem	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp. 300.000.000
11	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Lingkungan Front Office	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Surat Edaran Walikota Bekasi nomor 485/1260/org tentang Pelayanan Publik 	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	- indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Petugas Front office	- 13 orang Petugas Front Office	Hasil survei IKM Pelayanan Perizinan Meningkat	Rp. 350.000.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama								Rp. 2.800.000.000
12	Sinergitas Pengembangan Promosi / Penanaman Modal		Membangun Perekonomian Kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	Jumlah Event yang diikuti	2 Event	Jumlah Perjanjian Kerjasama Investasi	Rp. 300.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

13	Pemeliharaan Website SIID		Membangun Perekonomian Kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	Jumlah Website yang dipelihara, jasa konsultan	1 Website, 1 Paket	Terpeliharaan ya dan tersebarnya informasi investasi di kota Bekasi 1 website	Rp. 150.000.000
14	Kajian Analisis Penanaman Modal		Membangun Perekonomian Kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	Dokumen kajian Analisa penanaman Modal	1 Dokumen	Dokumen Peta penanaman modal	Rp.350.000.000
15	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal		Membangun Perekonomian Kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	Kunjungan ke Perusahaan	1 Laporan/Buku	Jumlah Buku, laporan monev	Rp.100.000.000
16	Penilaian Perusahaan PMA/ PMDN Terbaik di Kota Bekasi		Membangun Perekonomian Kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	Kunjungan ke perusahaan PMA, Kunjungan ke perusahaan PMDN, Pemenang Perusahaan terbaik.	10 kali, 5 Perusahaan PMA, 5 Perusahaan PMDN	Jumlah PMA/PMDN Terbaik	Rp.300.000.000
17	Pembinaan penanaman modal		Membangun Perekonomian Kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	Jumlah kegiatan Penanaman Modal	1 kali	Jumlah event yang diikuti	Rp. 200.000.000
18	Kajian Investasi Unggul		Membangun	Terciptanya iklim usaha	Jumlah dokumen	1 dokumen		Rp. 300.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI TAHUN 2017

			Perekonomian Kota yang maju	yang kondusif dan Kemudahan Investasi	kajian investasi unggul			
19	Fasilitasi Investasi dan Penunjang Pameran City Expo 2018		Membangun Perekonomian Kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	Jumlah event	1 dokumen		Rp. 750.000.000
20	Penyusunan Laporan Bidang SPM Penanaman Modal		Membangun Perekonomian Kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	Dokumen laporan SPM tentang penanaman modal	1 dokumen		Rp. 50.000.000
21	Penyusunan Database Investasi Kota Bekasi		Membangun Perekonomian Kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	Tersusunnya Data Mengenai Data PMA?PMDM di Kota Bekasi	1 Database		Rp. 300.000.000
Jumlah								Rp 6.100.000.000

3.4.2 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Strategi jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dapat menghasilkan rumusan Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut :

A. SASARAN

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi.

B. INDIKATOR SASARAN

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;

Ukuran : Hasil Survey IKM Pelayanan Perizinan

Rumus : Jumlah hasil survey

Ukuran : -

2. Peningkatan Penanaman Modal dan Investasi

Ukuran : Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi.

B A B I V

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Renstra DPMPTSP 2013-2018 diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dapat dilaksanakan secara efisien, efektif serta tepat sasaran.

Renstra 2013-2018 yang diimplementasikan dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2017 dalam rangka meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan dan meningkatkan penyelesaian perizinan dan penanaman modal sesuai waktu berdasarkan SOP.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan di bidang perizinan dan penanaman modal tergantung dari peran aktif, semangat, daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur yang terkait dengan bidang pelayan perizinan dan penanaman modal di Kota Bekasi serta didukung dengan sistem Informasi Teknologi.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/ sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renja dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renja yang dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi Renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan sesuai dengan Renja yang telah dibuat.

4. Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk mengetahui kinerja dari seluruh aparat. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi ini bisa berupa penyesuaian terhadap Renja untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
5. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renja ini secara kontinyu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja yang telah dibuat.
6. Dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi akan dilaksanakan 2 (dua) Program dengan 21 (Dua puluh satu) kegiatan dengan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2017 Sebesar **Rp 5.080.000.000** (Lima Miliar delapan puluh Juta Rupiah).

Semoga Rencana Kerja ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir yaitu “ Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ” serta tercapainya Visi DPMPTSP Kota Bekasi, *Kota Bekasi Sebagai Daya Tarik Penanaman Modal dengan pelayanan perizinan Yang **CEPAT, MUDAH, MUDAH dan TRANSPARAN.***

Di tetapkan di : Bekasi
Tanggal : 27 Mei 2016
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**

ttd

Drs. AMIT RIYADI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590511 198603 1 005